



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PETA JALAN PENGADAAN BARANG/JASA BERKELANJUTAN

TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa mempunyai peran penting dalam pembangunan Daerah guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa perlu memperhatikan aspek keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan diperlukan Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan Tahun 2023-2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETA JALAN PENGADAAN BARANG/JASA BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
3. Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan adalah rencana strategis yang memberikan arahan dalam implementasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.

#### Pasal 2

Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam mengimplementasikan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan di DIY selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2023 sampai dengan 2025.

#### Pasal 3

Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

- (1) Gubernur membentuk tim implementasi peta jalan dalam rangka pelaksanaan Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
  - a. melaksanakan perencanaan pelaksanaan Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan;
  - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan; dan
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

1. lingkungan hidup;
  2. perindustrian dan perdagangan;
  3. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  4. perencanaan daerah;
  5. pengadaan barang/jasa
  6. pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  7. hukum
- b. unsur lain terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 November 2023

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 57

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 57 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETA JALAN PENGADAAN  
BARANG/JASA BERKELANJUTAN  
TAHUN 2023-2025

1. DAFTAR SINGKATAN

BADIKLAT	:	Badan Diklat
BAPPEDA	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPKA	:	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
DLHK	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DISDIKPORA	:	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
DISKOMINFO	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
DISKOP UKM	:	Dinas Koperasi dan UKM
DISPERINDAG	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DIY	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
KADIN	:	Kamar Dagang dan Industri Indonesia
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
LHK	:	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
NSPK	:	Norma Standar Prosedur Kriteria
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
PA	:	Pengguna Anggaran
PBJ	:	Pengadaan Barang Jasa
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPMSE	:	Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PIWP2	:	Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SHBJ	:	Standard Harga Barang Jasa
UKPBJ	:	Unit Kerja Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah

## 2. RINCIAN PROGRAM STRATEGIS, PROGRAM KERJA, KEGIATAN, LINI MASA DAN INDIKATOR CAPAIAN

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
Peningkatan Kapasitas SDM Berkualitas Pada PBJ Berkelanjutan	Peningkatan kapasitas dan pemahaman SDM tentang Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan	<p>Diseminasi Peraturan Gubernur tentang Roadmap PBJ berkelanjutan ke seluruh PA/KPA di lingkup Pemerintah Daerah DIY</p> <p><b>Target waktu:</b> akhir Oktober</p> <p><b>Indikator capaian:</b> Terlaksana 1 kegiatan diseminasi Peraturan Gubernur tentang Roadmap PBJ Berkelanjutan bersama dengan para pelaku Pengadaan</p>			PIC: DLHK Mitra: UKPBJ

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*



Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
		Barang/Jasa			
		<p>Diseminasi Peraturan Gubernur tentang Roadmap PBJ berkelanjutan ke seluruh PPK di lingkup Pemerintah Daerah DIY</p> <p><b>Target waktu:</b> akhir Oktober</p> <p><b>Indikator capaian:</b> Terlaksana 1 kegiatan diseminasi Peraturan Gubernur tentang Roadmap PBJ berkelanjutan ke seluruh PPK di lingkup Pemerintah Daerah DIY</p>			<p>PIC: DLHK</p> <p>Mitra: UKPBJ</p>
		Diseminasi Peraturan Gubernur tentang Roadmap PBJ			<p>PIC: DLHK</p> <p>Mitra:</p>

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
		berkelanjutan ke seluruh Pokja Pengadaan/Agen Pengadaan di lingkup Pemerintah Daerah DIY  <b>Target waktu:</b> akhir Oktober  <b>Indikator capaian:</b> Terlaksananya 1 kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Roadmap PBJ Berkelanjutan ke seluruh Pokja Pengadaan/Agen Pengadaan di lingkup Pemerintah Daerah DIY			UKPBJ

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
		<p>Diseminasi Peraturan Gubernur tentang Roadmap PBJ berkelanjutan kepada penyedia dan produsen produk ramah lingkungan.</p> <p><b>Target waktu:</b> akhir Oktober</p> <p><b>Indikator capaian:</b> Terlaksananya 1 kegiatan diseminasi Peraturan Gubernur tentang Roadmap PBJ Berkelanjutan kepada seluruh penyedia dan produsen produk ramah lingkungan</p>			<p>PIC: DLHK</p> <p>Mitra: UKPBJ+ DISPERINDAG + DISKOP UKM</p>

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
	Pembentukan Norma-Standar-Prosedur-Kriteria (NSPK) sebagai pedoman teknis implementasi PBJ berkelanjutan di lingkup Pemda DIY	Penyusunan NSPK  <b>Target waktu:</b> akhir Oktober  <b>Indikator capaian:</b> 1 Dokumen NSPK			PIC: DLHK  Mitra: UKPBJ
			Evaluasi dan Reviu Berkala Kebijakan dan Pedoman Teknis PBJ berkelanjutan  <b>Target waktu:</b> akhir Desember  <b>Indikator capaian:</b> 1 dokumen hasil evaluasi dan reviu kebijakan dan pedoman PBJ Berkelanjutan	Evaluasi dan Review Berkala Kebijakan dan Pedoman Teknis PBJ berkelanjutan  <b>Target waktu:</b> akhir Desember  <b>Indikator capaian:</b> 1 dokumen hasil evaluasi dan reviu kebijakan dan pedoman PBJ Berkelanjutan	PIC: DLHK  Mitra: Biro Hukum + UKPBJ

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
	Peningkatan pemahaman teknis dan operasionalisasi program PBJ berkelanjutan untuk pelaku pengadaan	<p>Penyelenggaraan pelatihan PBJ Berkelanjutan untuk pelaku pengadaan (PA/KPA, PPK dan Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan) Pemda DIY</p> <p><b>Target waktu:</b> akhir Desember</p> <p><b>Indikator capaian:</b> 1 kegiatan pelatihan PBJ Berkelanjutan untuk para pelaku pengadaan (PA/KPA, PPK dan Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan) Pemda DIY</p>			<p>PIC: BADIKLAT</p> <p>Mitra: DLHK+ UKPBJ + KADIN + DISKOP UKM dan DISPERINDAG</p>

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
		<p>Penyelenggaraan pelatihan PBJ Berkelanjutan untuk produsen, distributor dan penyedia produk ramah lingkungan</p> <p><b>Target waktu:</b> akhir Desember</p> <p><b>Indikator capaian:</b> 1 kegiatan pelatihan PBJ Berkelanjutan untuk produsen, distributor dan pelaku usaha produk ramah lingkungan</p>			<p>PIC: DISKOP UKM dan DISPERINDAG</p> <p>Mitra: DLHK + UKPBJ + KADIN + BADIKLAT</p>
		<p>Penyelenggaraan market dialog untuk mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM</p>			<p>PIC: DLHK</p> <p>Mitra: UKPBJ + KADIN</p>

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
		<p><b>Target waktu:</b> akhir Desember</p> <p><b>Indikator capaian:</b> 1 kegiatan market dialog bersama dengan para pelaku pengadaan</p>			
				<p>Diseminasi dan tindak lanjut reviu kebijakan dan pedoman PBJ berkelanjutan</p> <p><b>Target waktu:</b> akhir Desember</p> <p><b>Indikator capaian:</b> 1 kegiatan diseminasi hasil tindak lanjut reviu kebijakan dan</p>	<p>PIC: DLHK</p> <p>Mitra: UKPBJ + DISPERINDAG + DISKOP UKM</p>

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
				pedoman PBJ berkelanjutan	
Pengembangan dan Peningkatan Produk Ramah Lingkungan	Perluasan lingkup pelaksanaan SHBJ dengan juga mencakup produk-produk ramah lingkungan	<p>Kajian terkait dengan cakupan produk ramah lingkungan</p> <p><b>Target waktu:</b> akhir November</p> <p><b>Indikator capaian:</b> 1 Laporan hasil kajian dan rekomendasi usulan produk ramah lingkungan ke SHBJ</p>			<p>PIC: DLHK</p> <p>Mitra: UKPBJ</p>
			<p>Diseminasi hasil kajian terkait dengan produk ramah lingkungan</p> <p><b>Target waktu:</b> akhir Juni</p>		<p>PIC: DLHK</p> <p>Mitra: UKPBJ</p>

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*



Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
			<p><b>Indikator capaian:</b> 1 kegiatan Diseminasi produk ramah lingkungan dalam pelaksanaan PBJ Berkelanjutan di lingkungan Pemda DIY</p>		
	Fasilitasi sertifikasi bagi UMKM produsen produk ramah lingkungan		<p>Melakukan fasilitasi sertifikasi skema produk ramah lingkungan kepada produsen produk ramah lingkungan yang belum bersertifikat</p> <p><b>Target waktu:</b> akhir Juni</p>		<p>PIC: DISKOP UKM</p> <p>Mitra: DLHK</p>

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
			<b>Indikator capaian:</b> - 1 Kegiatan fasilitasi sertifikasi skema produk ramah lingkungan kepada produsen produk ramah lingkungan yang belum bersertifikat - Jumlah sertifikat yang diperoleh (misal 5 sertifikat)		
			Melakukan koordinasi bersama dengan kementerian terkait guna menyelesaikan permasalahan		PIC: DLHK  Mitra: UKPBJ

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
			<p>sertifikasi yang dihadapi di daerah</p> <p><b>Target waktu:</b> akhir September</p> <p><b>Indikator capaian:</b> 1 kegiatan fasilitasi bersama dengan kementerian terkait Kegiatan Kunjungan Dinas Pembuatan rekomendasi</p>		
	Kajian kesiapan pasar untuk menyediakan produk ramah lingkungan		<p>Pengukuran terhadap ketersediaan produk ramah lingkungan di DIY</p> <p><b>Target waktu:</b> akhir Desember</p>		<p>PIC: DLHK</p> <p>Mitra: UKPBJ</p>

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
			<b>Indikator capaian:</b> Dokumen hasil kajian pengukuran ketersediaan produk ramah lingkungan di DIY		
			Pembuatan database produk ramah lingkungan  <b>Target waktu:</b> akhir Juni  <b>Indikator capaian:</b> Database produk ramah lingkungan (dalam bentuk sistem informasi)	PIC: DLHK  Mitra: DISKOMINFO	
			Pengembangan <i>Platform Knowledge Management</i> untuk proses PBJ	PIC: DLHK  Mitra: DISKOMINFO,	

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
			berkelanjutan.  <b>Target waktu:</b> akhir Desember  <b>Indikator capaian:</b> <i>Platform Knowledge Management</i> berupa <i>Learning Management Center</i> untuk PBJ Berkelanjutan terbentuk		BAPPEDA
	Konsultasi dan advokasi pengembangan dan peningkatan produk ramah lingkungan		Konsultasi dan advokasi pengembangan dan peningkatan produk ramah lingkungan dengan Kementerian LHK, Kemenperin dan Pusat Produksi		PIC: DLHK  Mitra: DISKOMINFO, BAPPEDA

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
			<p>Bersih Nasional (PPBN)</p> <p><b>Target Waktu:</b> Juni</p> <p><b>Indikator Capaian:</b> Dokumen Laporan Hasil Konsultasi dan Advokasi</p>		
	Peningkatan ketersediaan produk ramah lingkungan pada platform pengadaan secara elektronik (e-purchasing)		<p>Penambahan produk ramah lingkungan pada katalog lokal</p> <p><b>Target waktu:</b> akhir Juli</p> <p><b>Indikator capaian:</b> Tersedia etalase produk ramah lingkungan pada katalog lokal</p>		<p>PIC: UKPBJ</p> <p>Mitra: DLHK, DISKOP UKM, DISPERINDAG</p>

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
			<p>Melakukan edukasi dalam identifikasi produk ramah lingkungan pada platform toko daring / PPMSE</p> <p><b>Target waktu:</b> akhir Juli</p> <p><b>Indikator capaian:</b> 1 Kegiatan sosialisasi dalam mengedukasi dan mengidentifikasi produk ramah lingkungan pada platform toko daring yang dikelola oleh PPMSE</p>		<p>PIC: DISKOP UKM</p> <p>Mitra: UKPBJ, DLHK, DISPERINDAG</p>

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
Implementasi Regulasi dan Peningkatan Kesadaran Tentang PBJ Berkelanjutan	Pelaksanaan monev PBJ berkelanjutan secara periodik		Penyusunan mekanisme Monev Implementasi PBJ berkelanjutan yang dilakukan secara periodik  <b>Target waktu:</b> akhir Maret  <b>Indikator capaian:</b> Dokumen panduan mekanisme monev implementasi PBJ berkelanjutan		PIC: DLHK  Mitra: Tim Implementasi Roadmap
			Pembentukan tim kerja untuk PBJ berkelanjutan dalam rangka monev PBJ berkelanjutan di lingkup Pemda DIY  <b>Target waktu:</b> akhir		PIC: DLHK  Mitra: Tim Implementasi Roadmap, Biro Organisasi

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*



Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
			<p>Juni</p> <p><b>Indikator capaian:</b> Tim kerja PBJ berkelanjutan terbentuk dan ditetapkan</p>		
			<p>Pelaksanaan monev implementasi PBJ berkelanjutan secara periodik</p> <p><b>Target waktu:</b> akhir September</p> <p><b>Indikator capaian:</b> Terlaksananya 1 kegiatan desk evaluasi untuk monev PBJ Berkelanjutan. 1 Dokumen hasil</p>	<p>Pelaksanaan monev implementasi PBJ berkelanjutan secara periodik</p> <p><b>Target waktu:</b> akhir September</p> <p><b>Indikator capaian:</b> Terlaksananya 1 kegiatan desk evaluasi untuk monev PBJ Berkelanjutan.</p>	<p>PIC: DLHK</p> <p>Mitra: Tim Implementasi Roadmap</p>

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
			kegiatan desk evaluasi	1 Dokumen hasil kegiatan desk evaluasi	
			Pengembangan media komunikasi tentang PBJ berkelanjutan (flier, leaflet, poster, film pendek, sosial media)  <b>Target waktu:</b> akhir Maret  <b>Indikator capaian:</b> 3 konten untuk dipublikasi ke media komunikasi	Pengembangan media komunikasi tentang PBJ berkelanjutan (flier, leaflet, poster, film pendek, sosial media)  <b>Target waktu:</b> akhir Maret  <b>Indikator capaian:</b> 3 konten untuk dipublikasi ke media komunikasi	PIC: DLHK  Mitra: DISKOMINFO
			Penghargaan bagi pelaku PBJ berkelanjutan	Penghargaan bagi pelaku PBJ berkelanjutan	PIC: DLHK  Mitra: Tim

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
			<p>secara berkala (pengguna anggaran dan rekanan)</p> <p><b>Target waktu:</b> akhir Desember</p> <p><b>Indikator capaian:</b> Terlaksananya 1 kegiatan pemberian penghargaan bagi pelaku PBJ Berkelanjutan</p>	<p>secara berkala (pengguna anggaran dan rekanan)</p> <p><b>Target waktu:</b> akhir Desember</p> <p><b>Indikator capaian:</b> Terlaksananya 1 kegiatan pemberian penghargaan bagi pelaku PBJ Berkelanjutan</p>	Implementasi Roadmap, Biro Organisasi, UKPBJ
	Pelaksanaan Piloting PBJ Berkelanjutan	<p>Melakukan kegiatan piloting PBJ Berkelanjutan di 5 OPD di lingkungan Pemda DIY</p> <p><b>Target waktu:</b> akhir</p>		<p>Melakukan kegiatan piloting PBJ Berkelanjutan di 10 OPD di lingkungan Pemda DIY</p>	<p>PIC: DLHK</p> <p>Mitra: UKPBJ, DISKOP UKM, DISPERINDAG, DISKOMINFO, Biro Organisasi,</p>

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
		Desember  <b>Indikator capaian:</b> 5 OPD sudah melaksanakan PBJ Berkelanjutan		<b>Target waktu:</b> akhir Desember  <b>Indikator capaian:</b> 10 OPD sudah melaksanakan PBJ Berkelanjutan	Bappeda, Badiklat, DISDIKPORA, BPKA
		Melakukan kegiatan piloting PBJ Berkelanjutan untuk 3 produk ramah lingkungan  <b>Target waktu:</b> akhir Desember  <b>Indikator capaian:</b> 3 produk ramah lingkungan sudah diimplementasikan ke OPD piloting		Melakukan kegiatan piloting PBJ Berkelanjutan untuk 6 produk ramah lingkungan  <b>Target waktu:</b> akhir Desember  <b>Indikator capaian:</b> 6 produk ramah lingkungan sudah diimplementasikan ke OPD piloting	PIC: DLHK  Mitra: UPKBJ, DISKOP UKM, DISPERINDAG, DISKOMINFO, Biro Organisasi

Program Strategis	Program Kerja	Kegiatan, Lini Masa dan Indikator Capaian			Keterangan
		2023	2024	2025	
	Sinkronisasi atau penyesuaian kebijakan/program /kegiatan PBJ Berkelanjutan pusat dan daerah	Fasilitasi untuk penyesuaian kebijakan pusat ke daerah  <b>Target waktu:</b> akhir Desember  <b>Indikator capaian:</b> 1 laporan kegiatan penyesuaian terbentuk			PIC: DLHK Mitra: Biro PIWP2 (Bagian Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan).

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X